

**PERSEPSI PENERIMAAN PENGGUNA DALAM PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Skripsi

**Oleh
PUJI AYU LESTARI
NPM 1916041002**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERSEPSI PENERIMAAN PENGGUNA DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh

PUJI AYU LESTARI

E-government digunakan sebagai media promosi dan motivasi organisasi pemerintah yang lebih efisien. Pengadopsian teknologi dalam pemerintahan tidak pula terlepas dari kesediaan pengguna untuk mencapai penggunaan teknologi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa persepsi penerimaan pengguna dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Responden yang ditentukan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang telah menerapkan SIPD dengan total jumlah responden sebanyak 84 orang. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan Davis yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* yang melihat pada 2 dua indikator yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi penerimaan dalam penggunaan SIPD sangat baik dengan interpretasi persentase sebesar 81%, nilai ini berdasarkan pandangan responden dari dimensi persepsi kegunaan SIPD sebesar 83% yang diartikan memiliki kegunaan yang sangat baik dilihat dari indikator sebagaimana sistem yang dapat mempercepat pekerjaan, mempermudah pekerjaan, meningkatkan kinerja, juga kebermanfaatan sistem. Berikutnya, dimensi persepsi kemudahan pengguna SIPD sebesar 80% yang diartikan memudahkan bagi pengguna dalam penggunaan SIPD yang dilihat dari indikator kemudahan dipelajari, kejelasan dan dapat dipahami, dapat dikontrol, fleksibel, dan mudah digunakan. Sehingga penerimaan pengguna menunjukkan adanya penerimaan yang sangat baik dilihat dari persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna.

Kata kunci : Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Pengguna,
E-Government, *Technology Acceptance Model*

ABSTRACT

PERCEPTIONS OF USER ACCEPTANCE IN THE USE OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS IN NORTH LAMPUNG DISTRICT

By

PUJI AYU LESTARI

E-government used as a more efficient promotional and motivational media for government organizations. The adoption of technology in government cannot be separated from the user's willingness to achieve the use of technology. This research is aimed at analyzing perceptions of user acceptance in using the Local Government Information System (LGIS) in North Lampung Regency. This research uses quantitative methods with descriptive data analysis techniques. The data used is primary data obtained using a questionnaire. The respondents determined were the North Lampung Regency Regional Government Organization which had implemented LGIS with a total number of respondents of 84 people. This research uses the theory developed by Davis, namely Technology Acceptance model (TAM) which looks at 2 two indicators, namely perceived usefulness and perceived ease of use. The results of the research show that the perception of acceptance in the use of LGIS is very good with a percentage interpretation of 81%. This value is based on the respondents' views from the dimension of perceived usefulness of LGIS of 83% which is interpreted as having very good usability seen from indicators such as a system that can speed up work, make work easier, improving performance and system usability. Next, the dimension of perceived ease of use of LGIS users is 80%, which means that it makes it easier for users to use LGIS as seen from the indicators of ease of learning, clarity and understandability, controllability, flexibility and ease of use. So user acceptance shows very good acceptance in terms of perceived usefulness and perceived ease of use.

Keywords : Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, E-Government,
Technology Acceptance Model

**PERSEPSI PENERIMAAN PENGGUNA DALAM PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh

PUJI AYU LESTARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERSEPSI PENERIMAAN PENGGUNA
DALAM PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa : **Puji Ayu Testari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916041002**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I



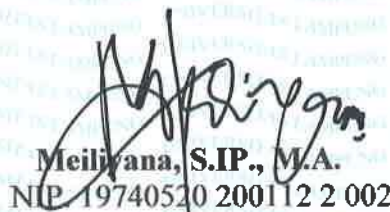
Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si
NIP. 19821212 200801 2 017

Pembimbing II



Ita Prihanitka, S.Sos., M.A
NIP. 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meiliana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si



Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A



Penguji : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Puji Ayu Lestari
NPM 1916041002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Puji Ayu Lestari, tempat tanggal lahir di Kotabumi 16 Juni 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ladi, S.Pd.i dan Ibu Karmini. Penulis pertama kali menempuh pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di MIN 1 Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur SNMPTN. Penulis aktif mengikut organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Pada periode Januari-Februari 2022 penulis melaksanakan KKN di Desa Bumi Mandiri, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari. Setelah itu pada bulan Maret-Agustus 2022 penulis mengikuti Program Magang Kampus Merdeka di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara selama 6 bulan.

MOTTO

Mulailah lagi dan jangan takut, tak usah khawatir semuanya kan baik-baik saja

(NCT)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT. sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada

**Ayah dan Mama tersayang
Bapak Ladi, S.Pd.i dan Ibu Karmini**

Terima kasih untuk setiap kasih sayang, dukungan, doa, bimbingan, motivasi, perjuangan, dan pengorbanan yang selalu diberikan untukku sehingga aku bisa melewati setiap proses yang dijalankan dan bisa mencapai gelar sarjana.

**Kakakku Tersayang
Wahyu Frendiansyah, S.E & Wahyu Frendianto, S.Pd**

Terima kasih atas dukungan, doa, dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

**Adikku Tersayang
Aisyah Mutiarani**

Terima kasih dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.

Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Terima kasih telah membimbing dengan ketulusan, memberikan bekal pengetahuan, dan pesan moral yang bermanfaat

Serta

**Almamater Tercinta
Universitas Lampung**

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan isinya. Berkat segala kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Penerimaan Pengguna dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dalam banyak hal untuk menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.SI selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.
2. Ibu Ita Prihantika S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing kedua sekaligus sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.. Terima kasih atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan selama bimbingan, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.
3. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dari seminar proposal hingga skripsi ini selesai. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segala hal.

4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik tanpa terkecuali. Terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti kedepannya.
6. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai administrasi dari mulai dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas bantuannya.
8. Teman-temanku “Pasukan Elite W” Mba egi, Kak Nanda, Anin, Amal, Kezia, Ipah. Terima kasih telah menjadi, teman, sahabat, keluarga yang selalu menemani dari maba hingga sekarang. Terima kasih untuk doa, dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga persahabatan ini terus berlanjut hingga kedepannya.
9. Teman-teman GRANADA Olivia, Dinda, Zahra, Jono, Agustina, Marfu'ah, Anada dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih atas momen kebersamaan selama menempuh perkuliahan. Semoga kita semua bisa menggapai cita-cita yang diinginkan dan bermanfaat bagi orang lain.
10. Untuk diriku sendiri, terima kasih untuk memulai, tetap melanjutkan, dan menyelesaikan. Terima kasih karena tetap sehat dan bisa melewati segala hal hingga saat ini.
11. Mama, Ayah, Mutia, Mas Rendi dan keluarga kecilnya, serta Mas Anto dan keluarga kecilnya. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Kalian mejadi alasan penulis untuk mencapai pada tahap ini. Terkhusus untuk mama dan ayah yang selalu memberikan dukungan dan berkorban untuk anak-anaknya sehingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana. Semoga setiap pendidikan yang didapatkan diberkahi Allah SWT. dan bermanfaat kedepannya, aamiin.

Akhir kata penulis penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, 15 Desember 2023
Penulis

Puji Ayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
GLOSARIUM	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 <i>E-Government</i>	7
2.1.1 Definisi <i>E-Government</i>	7
2.1.2 Tujuan dan Manfaat <i>E-Government</i>	8
2.1.3 Elemen Penerapan <i>E-Government</i>	9
2.2 Konsep Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik	10
2.2.1 Definisi Sistem Informasi	10
2.2.2 Komponen Sistem Informasi	11
2.2.3 Manfaat Sistem Informasi	13
2.2.4 Teori Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik.....	13
2.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	17
2.4 Kerangka Berpikir	18
III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	19
3.2 Definisi Konseptual dan Operational Variabel	19
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Uji Validitas dan Realibilitas	25

3.7 Teknik Analisis Data.....	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum.....	29
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	32
V. KESIMPULAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Definisi Operasional Variabel	22
2. Skala Pengukuran <i>Likert</i>	23
3. Hasil Uji Validitas.....	26
4. Hasil Uji reabilitas	27
5. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan pengelolaan informasi berdasarkan waktu	35
6. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan mempermudah pekerjaan	37
7. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan tampilan informasi yang dibutuhkan	38
8. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan proses lebih terjadwal	39
9. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan informasi minim kesalahan	40
10. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan kegunaan informasi untuk pemerintahan selanjutnya	41
11. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan manfaat dalam menyelesaikan tugas	42
12. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan	43
13. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan Bimbingan Teknis (Bimtek)	44
14. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan petunjuk teknis	45
15. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan kemudahan menguasai sistem	46
16. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan fitur yang jelas	47
17. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan fitur mudah dipahami.....	48
18. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan fitur bantuan	50
19. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan dapat mengontrol dalam penggunaan sistem.....	51
20. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan kemudahan menemukan dan melakukan yang diinginkan	52
21. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan akses mengedit	53
22. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan kemudahan akses (tempat dan waktu)	54
23. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan mudah digunakan dalam pengelolaan informasi pemerintahan	55
24. <i>Crosstabulation</i> berdasarkan <i>user</i> pada pernyataan SIPD mudah digunakan	56
25. Frekuensi Tanggapan Responden	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Kerangka Berpikir.....	18
2. Menu Utama SIPD.....	29
3. Menu informasi pembangunan daerah.....	30
4. Menu informasi keuangan daerah.....	31
5. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
6. Frekuensi Responden Berdasarkan <i>User</i>	33
7. Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	34
8. Pernyataan pengelolaan informasi berdasarkan waktu.....	35
9. pernyataan mempermudah pekerjaan.....	36
10. Deskripsi data pernyataan tampilan informasi yang dibutuhkan.....	37
11. Deskripsi data pernyataan proses lebih terjadwal.....	38
12. Deskripsi data pernyataan informasi minim kesalahan.....	39
13. Deskripsi data pernyataan kegunaan informasi untuk pemerintahan selanjutnya.....	40
14. Deskripsi data pernyataan bermanfaat dalam menyelesaikan tugas.....	41
15. Deskripsi data pernyataan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan.....	42
16. Deskripsi data pernyataan Bimbingan Teknis (Bimtek).....	44
17. Deskripsi data pernyataan petunjuk teknis.....	45
18. Deskripsi data pernyataan kemudahan menguasai sistem.....	46
19. Deskripsi data pernyataan fitur yang jelas.....	47
20. Deskripsi data pernyataan fitur mudah dipahami.....	48
21. Deskripsi data pernyataan fitur bantuan.....	49
22. Deskripsi data pernyataan kontrol sistem.....	50
23. Deskripsi data pernyataan kemudahan menemukan dan melakukan yang diinginkan.....	51
24. Deskripsi data pernyataan akses mengedit.....	52
25. Deskripsi data pernyataan kemudahan akses (tempat dan waktu).....	53
26. Deskripsi data pernyataan mudah digunakan dalam pengelolaan informasi pemerintahan.....	54
27. Deskripsi data pernyataan SIPD mudah digunakan.....	55

GLOSARIUM

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

OPD : Organisasi Pemerintah Daerah

SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

TAM : *Technology Acceptance Model*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal yang biasa untuk menilai seberapa jauh pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengurus daerahnya. Penerapan digitalisasi dalam kehidupan masyarakat untuk mempermudah dalam setiap lini kegiatan. Pengelolaan informasi pemerintahan daerah menjadi salah satu sesuatu yang sangat rentan dalam penyelenggaraan daerah jika terjadi suatu kesalahan. Informasi pemerintahan daerah yang kurang berkualitas hanya akan menjadi informasi yang tidak berguna, oleh karena itu mekanisme dalam pengelolaan informasi perlu diperhatikan sehingga dapat menjadi sangat berguna bagi daerah kedepannya. Teknologi informasi menjadi sarana dalam penyelenggaraan dengan tujuan agar penyelenggaraan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tentu ini didukung dengan keadaan yang sudah semakin canggih, dengan memasukkan sarana teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 391, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan media informasi pemerintahan daerah yang di dalamnya baik itu berupa informasi pembangunan daerah, ataupun informasi keuangan daerah yang mana informasi tersebut pengelolaannya dilakukan dalam suatu informasi (Wurara dkk, 2020).

Inovasi dalam melakukan pemerintahan daerah semakin ditingkatkan ke arah sistem digitalisasi sebagai sarana sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satunya pemerintahan daerah menggunakan Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai salah satu inovasi dalam bentuk pengelolaan informasi pemerintahan daerah yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dimana data-data di dalamnya akan langsung terpusat dengan Kemendagri. SIPD merupakan salah satu pengembangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk perwujudan pelaksanaan *e-government* (Astuti, 2022).

Penerapan SIPD ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Sistem informasi Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling berkaitan untuk digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan ini juga mempertimbangkan bahwa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan daerah belum mengatur Informasi Pemerintahan Daerah dalam satu sistem yang terhubung, oleh karena itu perlu untuk diganti.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan dorongan dan fasilitas yang membantu dalam pengambilan keputusan juga kebijakan dalam perencanaan pembangunan baik itu bagi daerah ataupun pemerintah pusat dan juga mendorong komitmen pemerintah daerah dalam pola kerjasama berdasarkan data serta informasi. SIPD mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintahan daerah. SIPD merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri yang dimana dalam pengelolaannya diawasi Kementerian, sehingga *server* ini terkoordinir langsung dengan pusat (bpkad.lampungutarakab.go.id, 2021). Tujuan dari adanya sistem ini data informasi pemerintah daerah di dalamnya lebih mudah diawasi, lebih transparansi dan akun. Sebagai penerapan dalam pengelolaan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, instansi Perangkat Pemerintahan Daerah telah menerapkan

SIPD sebagai media untuk pengelolaan dalam perencanaan dan keuangan di masing-masing instansi.

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara memiliki Perangkat Daerah yang mana masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk tercapai terbentuknya tujuan organisasi. Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu daerah pengguna SIPD yang menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai penunjang Perangkat Daerah dalam menjalankan sistem untuk proses pengelolaan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik Lampung Utara yang mengalami peningkatan, terutama dalam hal layanan administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE) 2022 Lampung Utara telah melewati nilai target yang ditentukan. Peningkatan ini didukung dengan sudah terintegrasinya Lampung Utara dengan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik salah satunya yaitu SIPD.

Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Asgarkhani (2005) dikutip dari Vanesha dkk (2022) yang menyatakan bahwa *e-government* digunakan sebagai media promosi dan motivasi organisasi pemerintah yang lebih efisien operasionalnya dan dapat menghemat biaya, memberi kenyamanan fasilitas layanan pemerintah untuk masyarakat dan bisnis, meningkatkan pembangunan ekonomi, serta membentuk kembali mekanisme layanan pada masyarakat dan pemerintahan. Wirawan (2020) menjelaskan *e-government* merupakan sistem IT yang dikembangkan pemerintah untuk memberikan pilihan pada masyarakat, mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi, juga pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di suatu negara. Fungsi teknologi informasi tidak hanya sekedar penunjang manajemen pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan atau dalam hal ini menawarkan perubahan dasar yang berkaitan pada proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern. *E-government*

mencoba untuk memanfaatkan “*digital knowledge*” yaitu hasil pengolahan data dan informasi yang berjalan di dalam infrastruktur *e-government* bisa dijadikan sumber pengetahuan yang dimanfaatkan ketika dibutuhkan (Indrajit, 2016). Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara pasti, dengan *e-government* diharapkan meningkatkan akses seluruh aspek layanan dan operasional pemerintahan guna kepentingan masyarakat, pegawai, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya (Vanesha dkk, 2022).

Pengadopsian teknologi tidak terlepas dari adanya tantangan, penerimaan dan adaptasi terhadap teknologi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi sehingga kesediaannya dapat mendukung tercapainya penggunaan teknologi. Menurut Gil-Garcia & Pardo (dalam Vanesha dkk, 2022) penerimaan teknologi bagi pengguna salah satunya dilihat pada perspektif kegunaan dan perspektif kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan penelitian oleh Fatmawati (2015) menjelaskan penerimaan teknologi dapat diartikan sebagai kesediaan bagi pengguna teknologi untuk mendukung tugas yang telah direncanakan. Model *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis menjelaskan bahwa bagaimana persepsi pengguna terhadap suatu sistem dapat memengaruhi sikap dari penggunaannya. Model TAM menetapkan persepsi kegunaan dan kemudahan pengguna sebagai suatu tingkat kepercayaan pada adanya teknologi baru yang mempengaruhi sikap pengguna.

Berdasarkan penelitian oleh Sayekti & Putarta (2016) mengenai penerapan *technology acceptance model* (TAM) dalam pengujian model penerimaan sistem informasi keuangan daerah di D.I Yogyakarta yang menunjukkan dalam penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Provinsi D.I Yogyakarta bahwa dalam perspektif kemudahan penggunaan, SIKD mudah digunakan dalam pekerjaan untuk responden, dan dalam perspektif kegunaan SIKD memberikan manfaat dalam pekerjaan responden. Selain itu, Penelitian oleh Febriyani & Dwi (2020) mengenai analisis pengaruh *technology acceptance model* (TAM) pada penggunaan sistem keuangan desa

studi pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Sruweng yang menunjukkan bahwa dari aparat desa menganggap adanya kegunaan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) akan memengaruhi keputusan untuk menggunakan aplikasi dalam penyelesaian pekerjaan mereka terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, berdasarkan persepsi kemudahan penggunaan, aparat desa menganggap adanya kemudahan menggunakan aplikasi tidak mempengaruhi keputusan untuk menggunakan SISKEUDES karena pengguna cenderung menerima SISKEUDES karena bermanfaat bagi mereka.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi penerimaan pengguna dalam menggunakan teknologi Informasi dalam Pemerintah Daerah yaitu SIPD. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Penerimaan Pengguna dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Seberapa besar persepsi kegunaan dalam penerimaan pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Utara?
- b. Seberapa besar persepsi kemudahan pengguna dalam penerimaan pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Utara?
- c. Seberapa besar persepsi penerimaan pengguna dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diperuntukkan untuk mengetahui persepsi penerimaan pengguna dalam penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) di kabupaten Lampung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan informasi khususnya bagi penulis, serta pihak lain pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dengan merealisasikan ilmu dan teori yang didapat membahas masalah penggunaan Sistem Informasi di instansi pemerintahan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan masalah yang relevan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *E-Government*

2.1.1 Definisi *E-Government*

Menurut Wibawa (2009), *e-government* adalah suatu kegiatan dalam penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan seperti internet, yang dapat digunakan sebagai upaya membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, maupun instansi pemerintahan lainnya (Ritonga, 2021). Menurut Weslatt (dalam Ritonga, 2021), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan juga menekan biaya menjadi lebih efektif, dan juga fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. *E-government* memiliki peran penting dalam mengubah pemerintahan yang berbelit-belit, pelayanan tidak maksimal, kurang transparan menjadi pemerintahan dengan produktivitas tinggi, transparan, fleksibel, juga pelayanan publik dengan kualitas tinggi. Dengan itu pula dibutuhkan pegawai dalam lembaga atau instansi pemerintahan untuk mencapai poin kinerja maksimal dan juga berkualitas dengan melaksanakan tanggung jawab yang dipegangnya dalam menjalankan amanah. Berdasarkan pengembangan *e-government* sebagai pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari dua aktivitas yang berhubungan, yaitu (Muliawaty, & Hendryawan, 2020):

- a. Mengelola data, informasi, sistem manajemen, dan proses kerja dengan elektronik.
- b. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik yang diberikan masyarakat diseluruh wilayah.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat *E-Government*

Berdasarkan pelaksanaannya, penggunaan data elektronik baik itu dalam mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan, dan juga dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk mempermudah mekanisme dalam penyelenggaraan negara, percepatan pembangunan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government*, diarahkan untuk tujuan, yaitu (Sudaning & Seputra, 2019):

- a. Membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik berkualitas dan lingkup sehingga dapat memuaskan masyarakat luas dan terjangkau diseluruh wilayah.
- b. Membentuk hubungan interaksi dengan swasta untuk peningkatan perkembangan ekonomi nasional dan perkuat kemampuan dalam menghadapi perubahan dan juga persaingan dalam perdagangan internasional.
- c. Membentuk sistem dan saluran komunikasi dengan setiap lembaga negara, dan juga menyediakan sarana untuk dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan negara.
- d. Membentuk sistem manajemen dan proses kerja transparan dan efisien, mempermudah transaksi dan juga layanan antar lembaga pemerintahan dengan pemerintahan daerah otonomi.

Pengembangan *e-government* menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dengan pelaksanaan yang lebih cepat efisien, juga dapat diandalkan. Dari pengembangan *e-government* manfaat yang dapat dirasakan yaitu (Muliawaty, & Hendryawan, 2020):

- a. Pelayanan jasa yang lebih baik lagi untuk masyarakat.

- b. Meningkatkan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Keterbukaan diharapkan dapat menghilangkan rasa curiga dan kekesalan terhadap pemerintah.
- c. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui data informasi yang mudah diperoleh. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan mampu menjangkau informasi yang diinginkan dengan mudah.
- d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, dalam mensosialisasikan produk pemerintah kepada seluruh aparaturnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat dengan dilakukan secara online.
- e. Bagi pemerintahan, dalam kegiatan surat-menyurat dan dokumen penting menjadi lebih mudah dan cepat. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien dan juga pelacakan data informasi yang dibutuhkan juga menjadi lebih cepat dilaksanakan.

2.1.3 Elemen Penerapan *E-Government*

Menurut Indrajit (2006), dalam penerapan *e-government* perlu memperhatikan 3 indikator, yaitu:

- 1) *Support* (dukungan), berkaitan dengan keinginan dari pemerintah dalam menerapkan *e-government* bukan hanya untuk mengikuti tren ataupun menentang prinsip *e-government* yang sudah jelas. Dukungan implementasi yang efektif dimulai dari pimpinan pemerintah tertinggi yang dalam hal ini presiden dan menteri, lalu merambat ke bawahnya. Dukungan yang diharapkan seperti:
 - a. Disepakatinya *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara mencapai visi misi.
 - b. Dialokasikannya sumber daya.
 - c. Dibangunnya infra dan superstruktur agar tercipta lingkungan kondusif.
 - d. Disosialisasikan secara merata, berlanjut, dan konsisten.

- 2) *Capacity* (kapasitas), berkaitan pada unsur kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *e-government* pada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Tersedia sumber daya terutama untuk sumber daya finansial.
 - b. Tersedia infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
 - c. Tersedia sumber daya manusia.
- 3) *Value* (nilai/manfaat), berkaitan dengan manfaat yang akan diberikan dari penerapan *e-government*. Pemerintah harus teliti dalam memilih *e-government* agar memberikan manfaat yang dirasakan secara signifikan. Jika tidak ada pihak yang diuntungkan, maka *e-government* tidak ada gunanya.

2.2 Konsep Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik

2.2.1 Definisi Sistem Informasi

Chamdan (2016) membagi menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan sistem, yaitu penekanan pada prosedurnya dan penekanan pada komponennya. Sistem yang menekankan pada prosedurnya dijelaskan oleh Baridwan bahwa, sistem ialah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, berkumpul bersama untuk menjalankan kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu. Sedangkan sistem yang menekankan pada komponennya dijelaskan oleh Bodnar dan Hopwood, bahwa sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Fagen dan Hall juga menjelaskan sistem ialah sekelompok dari subsistem yang memiliki hubungan antara objek serta hubungan antara sifat yang dimiliki dan tujuan yang sama (Awalia dkk., 2022).

Murdick dkk (dalam Indriyani & Gatningsih, 2013) yang menyebutkan informasi merupakan cakupan dari data yang diambil, diolah, atau digunakan untuk alasan informatif, argumentasi, ataupun sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga sependangan dengan Chamdan (2016) yang menyebutkan suatu informasi dapat berguna jika

didukung dengan tiga indikator, yaitu ketepatan pada orangnya, ketepatan waktu, dan ketepatan nilai. Menurut Certo dan Certo (dalam Indriyani & Gatningsih, 2013) juga menjelaskan ada beberapa faktor yang menentukan kebernilaian suatu informasi yaitu, ketepatan informasi, mutu informasi, keterbaruan informasi, dan jumlah informasi.

Menurut Gordon (dalam Alfani & Nasution, 2022), sistem informasi ialah suatu sistem yang menginput atau masuknya data dan instruksi, lalu data diolah berdasarkan dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya atau output. Kemajuan teknologi informasi menampakkan kedudukan informasi sebagai suatu aspek penting untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Alter (dalam Awalia dkk., 2022) menyebutkan bahwa sistem informasi sebagai jenis khusus dalam sistem kerja. Suatu sistem di mana individu atau mesin melakukan kegiatan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem informasi ini merupakan suatu sistem kerja yang ditujukan untuk pengolahan informasi. Sistem informasi merujuk pada interaksi antar manusia, data, teknologi, juga proses algoritmik yang bertujuan agar dengan sistem informasi data yang dihasilkan nantinya dapat berguna bagi pemakainya. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan data yang cukup sehingga dapat dijadikan suatu informasi yang berguna, hal ini didukung dengan relevansinya data, ketepatan waktu, dan ketepatan nilai atau keakuratan. Pengembangan dari sistem teknologi informasi ini merupakan suatu langkah dalam dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara cepat dan tepat.

2.2.2 Komponen Sistem Informasi

Chamdan (2016) menjelaskan setiap data yang diperoleh disimpan dahulu sehingga dapat diolah menjadi suatu informasi yang dibutuhkan. Ketepatan waktu informasi bisa dicapai dengan komponen teknologi. Komputer dapat mempercepat dalam proses pengolahan data dan

telekomunikasi bisa mempercepat proses transmisi data, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disajikan tepat waktu. Selain itu diperlukan komponen untuk mengendalikan untuk menghindari kesalahan dalam sistem informasi, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat. Jogianto (dalam Chamdan, 2016) menjelaskan dalam sistem informasi terdapat enam komponen yaitu:

- a. Komponen input, yaitu masuknya data. Dalam sistem informasi, data yang masuk kemudian diolah untuk menjadi informasi yang dibutuhkan.
- b. Komponen output, produk dari sistem informasi ialah informasi yang dapat dimanfaatkan bagi penggunanya.
- c. Komponen basis data, ialah sekumpulan data yang berkaitan tersimpan. Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan basis data yaitu, data yang diorganisasikan dalam bentuk basis data, simpanan permanen untuk menyimpan basis data yang merupakan bagian dari teknologi perangkat keras, dan perangkat lunak untuk mengerjakan suatu data.
- d. Komponen model, informasi yang dihasilkan berasal dari data yang diolah melalui suatu model tertentu. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan model logika atau dengan model matematika.
- e. Komponen teknologi, ialah alat dalam sistem informasi. Komponen teknologi dibagi menjadi dua kelompok yaitu, sistem komputer (*hardware* dan *software*) dan sistem telekomunikasi.
- f. Komponen kontrol, ialah komponen yang digunakan untuk mengendalikan data yang didapatkan sehingga menghasilkan informasi yang akurat.

Komponen-komponen ini menjadi satu-kesatuan dalam proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan.

2.2.3 Manfaat Sistem Informasi

Adapun beberapa manfaat dari pelaksanaan sistem informasi, yaitu (Chamdan, 2016):

- a. Meningkatkan aksesibilitas data secara tepat waktu dan akurat bagi pemakai.
- b. Menjamin tersedia kualitas dan keterampilan memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
- c. Pengembangan proses perencanaan yang efektif.
- d. Identifikasi kebutuhan keterampilan pendukung sistem informasi.
- e. Menetapkan investasi yang diarahkan sistem informasi.
- f. Antisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi.
- g. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- h. Penggunaan sistem informasi oleh organisasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu pelayanan.
- i. Penggunaan sistem informasi oleh bank untuk mengolah cek nasabah dan berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi.

2.2.4 Teori Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik

A. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Davis (dalam Fahlevi & Dewi, 2019) mengembangkan model *Technology Acceptance Model (TAM)* yang digunakan untuk mengkaji proses penerimaan penggunaan teknologi informasi. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan sistem informasi bisa menggunakan pendekatan teori perilaku. Reaksi dan opini dari penggunaan teknologi informasi bisa memengaruhi perilaku penerima teknologi informasi. Banyak peneliti menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk mencari *range* isu-isu dalam hal penerimaan pengguna. Peneliti sistem informasi

manajemen menggunakan TAM sebagai dasar teoritis penelitian pada faktor yang mempengaruhi penerimaan user mengenai teknologi informasi (Yusman, 2013).

Model ini melihat persepsi pengguna dalam menerima teknologi informasi melalui dua faktor utama, yaitu:

1. Persepsi Kegunaan

ketika pengguna yakin bahwa suatu sistem dapat membantu pekerjaan. Davis (dalam Wardhana, 2015) persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu tingkatan seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja. Dalam variabel ini diukur menggunakan indikator

- a) Mempercepat pekerjaan, tujuan terciptanya suatu teknologi ialah menghemat waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemanfaatan sistem informasi diharapkan memangkas waktu pengguna dalam melakukan pekerjaan.
- b) Mempermudah pekerjaan, aplikasi yang dibuat dapat mempermudah pekerjaan bagi penggunanya dalam menyelesaikan pekerjaan.
- c) Meningkatkan kinerja, penggunaan aplikasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja bagi penggunanya dalam melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih terjadwal dan hasil pekerjaan yang diperoleh maksimal.
- d) Bermanfaat, suatu sistem dapat diterima atau tidaknya dilihat pada kegunaannya. Menurut Jogianto (dalam Fahlevi & Dewi, 2019) tujuan dari sistem informasi ialah olahan data yang dihasilkan dapat berguna bagi penggunanya.

2. Persepsi Kemudahan penggunaan

ketika pengguna percaya kemudahan dalam menggunakan suatu sistem. Davis (dalam Wardhana, 2015) mendefinisikan persepsi kemudahan pengguna sebagai suatu tingkatan seseorang percaya bahwa dalam menggunakan satu sistem mudah dipahami dan

digunakan sehingga tidak menemukan kesulitan ketika menggunakan sistemnya. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan pengguna dapat diukur dengan indikator

- a) Mudah dipelajari, penggunaan aplikasi terlihat baik jika penggunanya dapat dengan mudah mempelajari dan memahami penggunaan sistem informasi dalam pekerjaan. Dalam mempelajari sistem, dapat dilakukan dengan adanya pelatihan khusus atau membaca prosedur yang disiapkan untuk menggunakan sistem.
- b) Jelas dan dapat dipahami, menurut Jogianto (dalam Fahlevi & Dewi, 2019) sistem informasi harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan dapat dengan mudah untuk dimengerti dan prosedurnya mudah untuk diikuti oleh pengguna. Pernyataan ini menjelaskan bahwa sistem informasi itu harus dapat diterima dengan mudah dan dipahami penggunanya.
- c) Dapat dikontrol, dalam sistem informasi komponen kontrol diperlukan untuk kemudahan bagi pengguna sistem. Kemudahan ini agar pengguna dapat mengendalikan sistem ketika melakukan suatu pekerjaan.
- d) Fleksibel, menurut Jogianto (dalam Fahlevi & Dewi, 2019) suatu sistem harus cukup fleksibel ketika terjadi perubahan dan dapat digunakan di manapun sistem ini dioperasikan.
- e) Mudah digunakan, menciptakan suatu sistem ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Sistem dapat dikatakan mudah jika, dalam penggunaan sistem tidak perlu menggunakan usaha yang keras untuk menjalankan sistemnya.

B. Model Delone dan Mclean

Kesuksesan sistem informasi dapat diukur melalui model kesuksesan informasi yang dikembangkan Delone dan Mclean (2003) yang diukur melalui enam faktor antara lain:

- a. Kualitas sistem, dapat dilihat dari indikator dalam kemudahan ketika digunakan, fleksibilitas, keandalan, kecepatan akses, dan keamanan akses.
- b. Kualitas informasi, mencakup kelengkapan informasi, kemudahan dalam pemahaman, format informasi, relevansi, dan akurasi informasi.
- c. Kualitas layanan, dapat dilihat dari dari jaminan sistem, empati, dan waktu respon layanan.
- d. Penggunaan, mengacu pada seberapa sering sistem akan digunakan. Indikator penggunaan dilihat dari hal-hal tentang kebiasaan penggunaan sistem seperti frekuensi penggunaan.
- e. Kepuasan pengguna, mencakup efisiensi, efektifitas, dan kepuasan secara keseluruhan.
- f. Manfaat bersih, yaitu dampak keberadaan sistem pada kinerja pengguna baik itu individu ataupun organisasi. Hal ini dilihat dari peningkatan kinerja, efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.

C. Model HOT-Fit

Model HOT-fit yang dikembangkan oleh Yusof *et al* menempatkan komponen penting dalam sistem informasi, yaitu (Tawar dkk, 2022):

- a. Manusia, dalam hal ini dilihat pada perasaan saat menggunakan yaitu pada aspek penggunaan sistem yaitu frekuensi pemakaian, cara kerja, keahlian, dan juga kepuasan pengguna.
- b. Organisasi, dalam hal ini dilihat pada aspek struktur dan juga lingkungan yaitu melingkupi dari pengelolaan, komunikasi, kepemimpinan, pembiayaan, peraturan dan hubungan pengguna dari aplikasi terkait.
- c. Teknologi, dalam hal ini dilihat dari kualitas sistem, informasi, dan layanan. Kualitas sistem mengukur pada kegunaan, kemudahan, kesiapan, dan keamanan. Kualitas informasi terkait pada kelengkapan, akurasi, ketersediaan, dan relevansi. Serta kualitas layanan terkait dengan dukungan yang diberikan pada pelaksanaan sistem.

Peneliti menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk mengkaji sikap pengguna dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara. Model ini peneliti pilih karena variabel-variabel yang ada di dalam teori tersebut cocok untuk mengetahui bagaimana persepsi penerimaan pengguna dalam menggunakan SIPD di Kabupaten Lampung Utara.

2.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

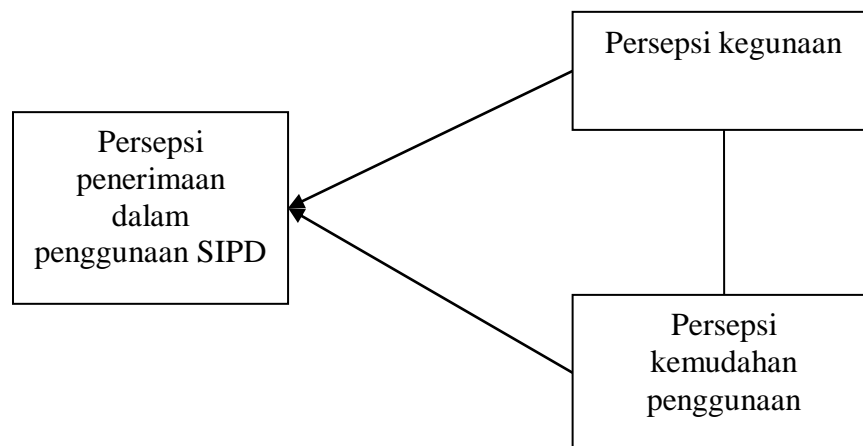
Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan suatu pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak dan perangkat keras juga staff/pegawai sebagai pelaksana untuk mengolah data yang nantinya dapat dimanfaatkan. Kemendagri merancang SIPD dengan tujuan untuk membenahi alur tahapan penataan dokumen rencana daerah berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang telah diatur (Alfani & Nasution, 2022). Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dijelaskan SIPD ialah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penerapan SIPD ini bertujuan untuk mewujudkan menuju *Good Governance* dan menghasilkan Indonesia satu data yang akurat dan setiap daerahnya terintegrasikan hingga ke pusat (Astuti, 2022).

Pelaksanaan dalam kegiatan SIPD, Menteri bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SIPD Provinsi. Begitu pula dengan Gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat, bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SIPD di Kabupaten/Kota. Anggaran dana yang digunakan dalam penyelenggaraan SIPD ini juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendapatan yang sah lainnya dan tidak mengikat.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. penelitian kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara variabel (Priadana & Sunarsi, 2021). Penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang dapat digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2013). Dikatakan metode kuantitatif dikarenakan data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Priyono (dalam Hardani dkk, 2020) pendekatan kuantitatif biasanya dilakukan dengan jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan populasi yang ada dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan rumus tertentu. Kemudian disesuaikan dengan jenis dan homogenitas populasi. Penelitian deskriptif menganalisis data secara sistematis. Analisis yang digunakan ialah analisis persentase dan kecenderungan. Kesimpulan yang dihasilkan juga tidak bersifat umum (Hardani dkk, 2020).

3.2 Definisi Konseptual dan Operational Variabel

3.2.1 Definisi Konseptual

Persepsi penerimaan pengguna dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat diartikan sebagai suatu pandangan dari kesediaan pengguna yang dalam hal ini adalah Perangkat

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk membantu pekerjaan di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Penerapan teknologi dalam pelaksanaan sistem informasi bisa menggunakan pendekatan teori perilaku. Banyak peneliti menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk mencari *range* isu-isu dalam hal penerimaan pengguna dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara.

3.2.2 Definisi Operasional

Penelitian ini, melihat persepsi pengguna dalam menerima penggunaan SIPD berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) melalui dua faktor utama, yaitu:

1. Persepsi Kegunaan

persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu tingkatan seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja. Dalam variabel ini diukur menggunakan indikator

- a) Mempercepat pekerjaan, tujuan terciptanya suatu teknologi ialah menghemat waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemanfaatan sistem informasi diharapkan memangkas waktu pengguna dalam melakukan pekerjaan.
- b) Mempermudah pekerjaan, aplikasi yang dibuat dapat mempermudah pekerjaan bagi penggunanya dalam menyelesaikan pekerjaan.
- c) Meningkatkan kinerja, penggunaan aplikasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja bagi penggunanya dalam melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih terjadwal dan hasil pekerjaan yang diperoleh maksimal.
- d) Bermanfaat, suatu sistem dapat diterima atau tidaknya dilihat pada kegunaannya. Menurut Jogianto (dalam Fahlevi & Dewi, 2019) tujuan dari sistem informasi ialah olahan data yang dihasilkan dapat berguna bagi penggunanya.

2. Persepsi Kemudahan penggunaan

Persepsi kemudahan pengguna didefinisikan sebagai suatu tingkatan seseorang percaya bahwa dalam menggunakan satu sistem mudah dipahami dan digunakan sehingga tidak menemukan kesulitan ketika menggunakan sistemnya. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan pengguna dapat diukur dengan indikator

- a) Mudah dipelajari, penggunaan aplikasi terlihat baik jika penggunanya dapat dengan mudah mempelajari dan memahami penggunaan sistem informasi dalam pekerjaan. Dalam mempelajari sistem, dapat dilakukan dengan adanya pelatihan khusus atau membaca prosedur yang disiapkan untuk menggunakan sistem.
- b) Jelas dan dapat dipahami, menurut Jogianto (dalam Fahlevi & Dewi, 2019) sistem informasi harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan dapat dengan mudah untuk dimengerti dan prosedurnya mudah untuk diikuti oleh pengguna. Pernyataan ini menjelaskan bahwa sistem informasi itu harus dapat diterima dengan mudah dan dipahami penggunanya.
- c) Dapat dikontrol, dalam sistem informasi komponen kontrol diperlukan untuk kemudahan bagi pengguna sistem. Kemudahan ini agar pengguna dapat menemukan apa yang diinginkan dari sistem ketika melakukan suatu pekerjaan.
- d) Fleksibel, menurut Jogianto (dalam Fahlevi & Dewi, 2019) suatu sistem harus cukup fleksibel ketika terjadi perubahan dan dapat digunakan di manapun sistem ini dioperasikan.
- e) Mudah digunakan, menciptakan suatu sistem ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Sistem dapat dikatakan mudah jika, dalam penggunaan sistem tidak perlu menggunakan usaha yang keras untuk menjalankan sistemnya.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Kode	Skala Pengukuran
1.	Penerimaan pengguna	Presepsi kegunaan	Mempercepat pekerjaan	Pengelolaan informasi menggunakan SIPD membutuhkan waktu yang lebih singkat.	K1	<i>Likert</i>
			Memudahkan pekerjaan	Penggunaan SIPD mempermudah pekerjaan dalam penginputan dibutuhkan pengguna.	K2	
				Penggunaan SIPD mempermudah dengan menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna.	K3	
			Meningkatkan kinerja	SIPD membuat proses pengelolaan informasi terjadwal lebih baik.	K4	
				Informasi yang dihasilkan minim kesalahan	K5	
			bermanfaat	Informasi yang dihasilkan dapat berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya	K6	
				SIPD bermanfaat dalam penyelesaian tugas instansi untuk pengelolaan rencana kerja dan pengelolaan anggaran instansi.	K7	
				SIPD bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan instansi untuk rencana kerja dan pengelolaan anggaran instansi.	K8	
		Persepsi kemudahan pengguna	Mudah dipelajari	Dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk penggunaan SIPD.	KP1	
				Terdapat petunjuk teknis untuk menjalankan sistem.	KP2	
				SIPD mudah dikuasai untuk digunakan.	KP3	
			Jelas dan dapat dipahami	Fitur dalam SIPD jelas untuk digunakan.	KP4	

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Kode	Skala Pengukuran
				Fitur dalam SIPD mudah dipahami untuk digunakan.	KP5	
				Terdapat fitur bantuan ketika ditemukan kesulitan dalam menggunakan sistem.	KP6	
			Dapat dikontrol	pengguna dapat mengontrol pekerjaan yang dilakukan di SIPD	KP7	
				Pengguna dapat dengan mudah menemukan dan melakukan apa yang diinginkan di SIPD	KP8	
			Fleksibel	Pengguna dapat mengedit informasi yang diinput ketika terjadi perubahan dalam pekerjaan.	KP9	
				SIPD memudahkan untuk mengakses informasi dimana saja dan kapan saja.	KP10	
			Mudah digunakan	SIPD cukup mudah untuk digunakan dalam membantu pengelolaan informasi pemerintahan.	KP11	
				Pengguna dapat menggunakan SIPD dengan mudah.	KP12	

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2013), skala *Likert* dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok mengenai suatu fenomena sosial.

Tabel 2. Skala Pengukuran *Likert*

No.	Skala	Skor
1	Sangat Setuju	4
2	Setuju	3
3	Tidak Setuju	2
4	Sangat Tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono, 2013

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lampung Utara yang telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

A. Populasi

Populasi adalah generalisasi atas objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek ataupun benda-benda yang lain (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini diambil dari daftar 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Utara (<https://lampungutarakab.go.id/>, diakses pada 4 Mei 2023). Adapun populasi dari penelitian ini terdapat 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Utara yang menggunakan SIPD dengan responden yang memiliki keterkaitan yaitu, *User* :

- 1) Bendahara Pengeluaran
- 2) Kasubag Program/Perencanaan
- 3) Pengguna Anggaran

B. Sampel Penelitian

Sampel ialah bagian populasi yang memiliki karakteristik dengan populasi itu sendiri. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel ini yang disebut statistik (Priadana & Sunarsi, 2021). Dalam penelitian ini, menggunakan sampel dari 28 OPD di Kabupaten Lampung Utara dipilih berdasarkan adanya pengguna yang lengkap dan merupakan OPD yang sudah lebih awal menggunakan SIPD. Dari setiap OPD akan dipilih 3 pegawai yang akan menjadi responden sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, sehingga disimpulkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 84.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner ini diberikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kuisisioner ialah teknik yang digunakan dengan memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.6 Uji Validitas dan Realibilitas

3.6.1 Uji Validitas

Validitas ialah istilah dalam mengkan kemampuan instrumen dalam mengukur sesuatu. Validitas berarti membicarakan kesahihan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data. Untuk menjamin validitas, instrumen penelitian baiknya diuraikan mengenai aspek yang terkandung dalam variabel penelitian (Syahrur, & Salim, 2012). Dalam penelitian ini, menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} [n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}$$

Keterangan :

- r : Koefisien korelasi
- n : Jumlah Responden
- x : skor pertanyaan
- y : Skor total

Data dikatakan valid jika r hitung > r .

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Item	r hitung	r	Keterangan
PK1	0,812	0,3202	VALID
PK2	0,727	0,3202	VALID
PK3	0,879	0,3202	VALID
PK4	0,733	0,3202	VALID
PK5	0,829	0,3202	VALID
PK6	0,774	0,3202	VALID
PK7	0,689	0,3202	VALID
PK8	0,836	0,3202	VALID
PKP1	0,407	0,3202	VALID
PKP2	0,545	0,3202	VALID
PKP3	0,764	0,3202	VALID
PKP4	0,612	0,3202	VALID
PKP5	0,732	0,3202	VALID
PKP6	0,768	0,3202	VALID
PKP7	0,788	0,3202	VALID
PKP8	0,761	0,3202	VALID
PKP9	0,739	0,3202	VALID
PKP10	0,737	0,3202	VALID
PKP11	0,796	0,3202	VALID
PKP12	0,788	0,3202	VALID

Sumber : diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan pengambilan uji validitas, membandingkan r hitung dengan r yaitu:

- a. Apabila nilai r hitung $>$ r , maka dikatakan valid
- b. Apabila nilai r hitung $<$ r , maka dikatakan tidak valid

Dari pengambilan uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini, pada taraf signifikan 5% yaitu 0,3202

3.6.2 Uji Reabilitas

Reabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten meski adanya perubahan waktu. Dengan kata lain instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama menghasilkan data

yang sama (Syahrur, & Salim, 2012). Dalam penelitian ini, uji reabilitas yang digunakan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*:

$$r_i = \left\{ \frac{k}{(k-1)} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right\}$$

Keterangan:

r_i : Koefisien reabilitas

k : Jumlah pertanyaan

$\sum \sigma_i^2$: jumlah varian butir

σ_t^2 : Varian skor total

Suatu kuisisioner dinyatakan reliabel jika dilihat pada nilai *Cronbach Alpha*, yaitu:

- a. apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 maka kuisisioner dikatakan reliabel.
- b. apabila nilai *Cronbach Alpha* < 0,6 maka kuisisioner dikatakan tidak reliabel.

Berikut hasil uji reabilitas :

Tabel 4. Hasil Uji reabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.924	20

Dapat dilihat pada hasil *reability statistics* di atas dengan nilai nilai *Cronbach Alpha* yaitu 0,924 dari 20 item. Jadi hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Maka dari itu disimpulkan bahwa kuisisioner dinyatakan reliabel untuk digunakan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data statistik deskriptif. Statistif deskriptif adalah statistik untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif penyajian data melalui , grafik, diagram, perhitungan median, mean, modus, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase (Darwin dkk, 2021). Secara teknis, statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bertujuan untuk membuat generalisasi sehingga tidak adanya kesalahan generalisasi (Sugiyono, 2013).

Untuk memperoleh persentase perolehan skor jawaban dari pencapaian tanggapan responden, peneliti menggunakan rumus (Riduwan dalam Tumpia dkk, 2021):

$$P = \frac{F_o}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P : Persentase jawaban

F_o : Jumlah jawaban yang didapatkan

N : Jumlah skor ideal

Kemudian, hasil persentase dari yang diperoleh peneliti dari hasil pencapaian tanggapan responden intepretasikan dengan kategori sebagai berikut (Riduwan dalam Tumpia dkk, 2021):

- a. 81% - 100% = Sangat Tinggi
- b. 61% - 80% = Tinggi
- c. 41% - 60% = Cukup
- d. 21% - 40% = Rendah
- e. 0% - 20% = Sangat Rendah

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- A. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara dari persepsi kegunaan mencapai kategori persentase sangat tinggi yaitu 83%. Nilai ini menunjukkan bahwa bagi pengguna dalam penggunaan SIPD dilihat dari persepsi kegunaannya yang bermanfaat untuk digunakan, mempermudah pekerjaan, meningkatkan kinerja, juga dapat mempercepat pekerjaan.
- B. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara dari persepsi kemudahan pengguna mencapai kategori persentase tinggi yaitu 80%. Nilai ini menunjukkan tanggapan baik dari pengguna dalam kemudahan penggunaan SIPD dari persepsi kemudahan pengguna dapat dengan mudah digunakan, dapat dikontrol, mudah dipelajari, fleksibel, serta sistem yang jelas dan dapat dipahami.
- C. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Lampung Utara persepsi penerimaan pengguna memperoleh persentase sebesar 81%. Persentase ini masuk kedalam kategori Sangat Tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa responden dapat menerima penggunaan SIPD yang dilihat dari dimensi persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

- A. Menambahkan adanya fitur bantuan atau *link* pengaduan dari tim pengelola kabupaten yaitu Bappeda atau BPKAD agar kesulitan yang dihadapi pengguna dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti secara cepat.
- B. Bappeda atau BPKAD selaku tim pengelola kabupaten dapat membuat video tutorial yang dapat disebarakan kepada setiap OPD atau pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan secara online. Hal ini dikarenakan tidak meratanya OPD yang mendapatkan informasi dan mengikuti bimbingan teknis, sehingga dengan saran ini diharapkan sistem dapat disosialisasikan secara merata kepada OPD-OPD sebagai pengguna SIPD tanpa terkecuali.
- C. Bappeda atau BPKAD selaku tim pengelola kabupaten sebaiknya menyebarkan panduan penggunaan SIPD secara tepat kepada seluruh pengguna sehingga pengguna bisa lebih cepat memahami dalam penggunaan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036-4043.
- Astuti, R. W. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Bappeda Provinsi Lampung. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Awalia, Syifa, dkk. (2022). *Sistem Informasi Manajemen*. Banyumas: Pena Persada.
- Chamdan, P. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Mojokerto: Insan Global.
- Darmawan, P. F., Pradnyana, M. A., & Divayana, D. H. (2019). Analisis Penerimaan Pengguna Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPPTSP) Menggunakan Pendekatan Utaut. *Karmapati (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika)*, 8(2), 379-393.
- Darwin, M., Marianne. R. M., Salman. A. S., Yuliana. N., Diana. A., I Made. D. M. A., Budi. P., Pasionista. V., & Antonius. A. G. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung :Penerbit Media Sains Indonesia
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of management information systems*, 19(4), 9-30.
- Fahlevi, P., & Dewi, A. O. P. (2019). Analisis Aplikasi Ijateng dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(2), 103-111.
- Fatmawati, E. (2015). Technology Acceptance Model (TAM) untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Iqra: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 9(1), 196942.
- Febriyani, K., & Suprajitno, D. (2020). Analisis Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 515-528.
- Hardani, D., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi. Pertama Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu,.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Aptikom.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. *Electronic Government*, 84.
- Indriyani, Etin & Gatningsih. (2013). *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya Pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Sumedang: IPDN Press.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45-57. <https://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Ritonga, J. K. (2021). Pemanfaatan Program E-Absensi dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15937>.
- Sayekti, F., & Putarta, P. (2016). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 9(3), 196-209
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus*, 11(2). <https://ejournal2.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/284>.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tawar, Santoso, A. F., & Salma, Y. S. (2022). Model HOT FIT dalam Manajemen Sistem Informasi. *Bincang Sains dan Teknologi*, 1(02), 76-82. <https://doi.org/10.56741/bst.v1i02.144>

- Tumpia, A., Adolfina, A., & Uhing, Y. (2021). Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Resistensi Individu pada Perubahan Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Vanesha, A. F., Wulandari, E., & Driyantini, E. (2022). Pengaruh Sikap Optimisme dan Inovatif terhadap Kemudahan yang Dirasakan (Perceived Ease of Use) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1-9.
- Wardhana, C. (2015). Analisis Penggunaan E-Learning Edmodo dengan Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) pada Mata Pelajaran Simulasi Digital Kelas X RPL di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.
- Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31423>.
- Yusman, Y. (2013). *Analisis Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Menggunakan Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Dokumen dan Lain-lain

- bpkad.lampungutarakab.go.id. (2021). *BKA Lampung Mengikuti Bimtek Implementasi Penganggaran Keuangan Daerah berbasis SIPD*. Diakses pada 04 September 2022, dari <https://bpkad.lampungutarakab.go.id/bpkad-lampung-gelar-sosialisasi-dan-pelatihan-aplikasi-sippkd-versi-2-dalam-apbd-2021/>.
- PANRB. (2023). Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2022 Pemerintahan Kab. Lampung Utara.
- Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berita Negara No. 1114 Tahun 2019. Kemendagri.